

Pemolisian Kolaboratif dalam Penanganan Konflik Sosial: Studi Kasus Konflik Sara di Desa Mareje, Lombok Barat

Donny Bayuanggoro

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Indonesia

Email : donny43@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas penerapan pemolisian kolaboratif dalam menangani konflik sosial berbasis Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) dengan studi kasus konflik di Desa Mareje, Lombok Barat, NTB, pada tahun 2021. Berfokus pada metode kualitatif studi kasus, penelitian ini menganalisis dinamika interaksi antara polisi, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain dalam menangani konflik. Hasil menunjukkan bahwa pemolisian kolaboratif melalui keterlibatan lintas sektor efektif meredam ketegangan serta mendukung pemulihan pasca konflik. Namun, tantangan dalam komunikasi dan sinergi antar pihak masih menjadi hambatan dalam penerapan strategi kolaboratif ini. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan keterlibatan multi-sektor dan kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan efektivitas dalam menangani konflik SARA di masa mendatang.

Kata Kunci: Pemolisian Kolaboratif, Konflik SARA, Lombok Barat, Konflik Sosial, Kolaborasi Multi-Sektor

Abstract

This study discusses the application of collaborative policing in handling ethnic, religious, racial, and intergroup (SARA)-based social conflicts with a case study of conflict in Mareje Village, West Lombok, NTB, in 2021. Focusing on the qualitative method of case studies, this study analyzes the dynamics of interactions between the police, the community, and other stakeholders in handling conflicts. The results show that collaborative policing through cross-sector involvement is effective in reducing tensions and supporting post-conflict recovery. However, challenges in communication and synergy between parties are still obstacles in the implementation of this collaborative strategy. This study recommends increased multi-sector engagement and cross-sector collaboration to improve effectiveness in handling future SARA conflicts.

Keywords: Collaborative Policing, SARA Conflict, West Lombok, Social Conflict, Multi-Sector Collaboration.

Pendahuluan

Furnivall (1948) adalah orang pertama yang menggunakan istilah "masyarakat majemuk" ketika dia membahas kebijakan dan praktik pemerintah jajahan di Burma dan Indonesia. Dia menunjukkan bahwa masyarakat majemuk memiliki penduduk yang saling berbeda dari segi ras dan suku, yang hidup dalam kelompok-kelompoknya masing-masing dan hanya bertemu di pasar (Fuadi, 2020). Ciri-ciri ini ada pada masyarakat

jajahan yang merupakan produk dari politik ekonomi penjajah untuk menguasai sumber-sumber daya yang ada setempat (Purwatiningsih & Polri, 2020);(Yana, 2019). Produk dan politik ekonomi ini adalah penggabungan masyarakat pribumi secara paksa ke dalam masyarakat jajahan untuk kepentingan ekonomi penjajah (Susi et al., 2021).

Selain golongan penjajah dan pribumi, ada juga golongan pedagang perantara, yang sebagian besar adalah orang asing dan tidak tergolong sama secara sosial dan rasial dengan kedua golongan tersebut (Ummah, 2023). Tiga golongan ini terdiri dari garis vertikal di Indonesia: orang Belanda dan kulit putih lainnya, orang Pribumi, dan orang Timur Asing (Cina dan Arab). Masing-masing dari golongan ini hidup dalam kelompok dan permukimannya sendiri sesuai dengan budaya dan pranata mereka sendiri, dan kehidupan mereka diatur oleh hukum yang berbeda (Sahputra, 2021).

Sentra nasional Indonesia, yang didirikan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menyatukan dan mengatur masyarakat majemuk Indonesia dengan keanekaragaman suku dan kebudayaan mereka. Hubungan antara pemerintahan nasional, atau pemerintah pusat, dan masyarakat sukubangsa yang tergabung di dalamnya adalah masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat majemuk (NG et al., 2023). Masalah ini muncul saat suku-suku bangsa itu menyadari posisinya dan berubah menjadi kekuatan sosial politik dalam upaya mempertahankan sumber daya yang secara adat dianggap sebagai hak mereka, dan yang secara hukum nasional dianggap sebagai hak pemerintahan nasional menurut UUD 1945.

Multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan (Bennett 1995 (Mustaqim & Mustaghfiroh, 2015). Baik perbedaan individual maupun perbedaan kebudayaan. Multikulturalisme menjadi acuan keyakinan untuk terwujudnya pluralisme budaya, dan terutama memperjuangkan kesamaan hak dari berbagai golongan minoritas baik secara hukum maupun secara sosial (Jati, 2014). Dalam pertempuran ini, multikulturalisme menjadi acuan yang paling diterima dalam masyarakat demokratis karena perjuangan yang diperjuangkan oleh pendukung multikulturalisme sejalan dengan perjuangan para penganut demokrasi (Hardiawan & Agus, 2021).

Dalam masyarakat-masyarakat yang heterogen yang menjadi corak masyarakat-masyarakat setempat di Indonesia, hubungan antar-sukubangsa terwujud sebagai hubungan antar-perorangan, antar-komuniti, antar-kelompok atau antar-masyarakat sukubangsa yang satu dengan yang lainnya, yang hidup bertetangga satu dengan lainnya. Corak hubungan antar-sukubangsa seperti ini cenderung mantap, karena telah berlangsung selama beberapa generasi sehingga mereka itu telah saling kenal mengenal secara mendalam. Sehingga stereotip atau prasangka yang dipunyai oleh masing-masing sukubangsa tersebut lebih mendekati kenyataan yang sebenarnya.

Sedangkan dalam hubungan antar-sukubangsa yang baru saja terjadi diantara dua sukubangsa atau lebih, coraknya bisa berubah-ubah atau belum mantap. Di satu saat bisa dalam keadaan saling mengerti dan damai tetapi di saat yang lain bisa terjadi konflik dengan kekerasan yang melibatkan keseluruhan anggota sukubangsa yang bersangkutan. Multikulturalisme di Indonesia bukan berarti hanya sebagai sebuah kekayaan, namun harus dirawat karena berpotensi menimbulkan konflik SARA.

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menangani konten mengenai ujaran Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) sebanyak 3.640 konten sejak tahun 2018. Kominfo telah melakukan pemutusan akses atau takedown terhadap 3.640 konten yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. Dari 3.640 konten tersebut, di dalamnya termasuk pemutusan akses terhadap 54 konten yang diduga mengandung muatan kebencian dan permusuhan (Kominfo.go.id, 2021).

Kerusuhan sosial terutama yang bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) bukanlah fenomena hal yang baru dalam sejarah Indonesia. NTB tercatat sebanyak 145 kasus dari tahun 2014 hingga tahun 2020. Konflik sosial adalah suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan (Tambunan & Hamid, 2024).

Menurut teori konflik, masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh pertentangan yang terus menerus diantara unsur-unsurnya. Teori konflik melihat bahwa setiap elemen memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial. Teori konflik melihat bahwa keteraturan yang terdapat dalam masyarakat itu hanyalah disebabkan karena adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari atas golongan yang berkuasa. Salah satu konflik yang sempat menjadi perhatian adalah konflik di Desa Mareje, Lombok Barat, NTB.

Konflik antar masyarakat yang terjadi sejak malam takbiran, Minggu (1/5/2022) di Desa Mareje, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) berujung kerusuhan. Di mana, ada 6 (enam) unit rumah dan 3 (tiga) unit sepeda motor dibakar pada hari Selasa (3/5/2022) malam. Peristiwa tersebut membuat ratusan warga harus mengungsi dari pemukimannya. Polri selaku institusi yang diberikan wewenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri sebagai pembina Kamtibmas, pelindung, pengayom, pelayan masyarakat dan penegak hukum, berkewajiban menyikapi perkembangan tuntutan situasi.

Konsep “Transformasi Menuju Polri yang Presisi” hadir melalui penekanan pada upaya pendekatan pemolisian yang prediktif, yang diharapkan bisa membangun kejelasan dari setiap permasalahan keamanan dalam menciptakan keteraturan sosial di tengah-tengah masyarakat (Sahputra, 2021). Sebagaimana tertuang dalam program prioritas Kapolri ke-10 Polri berusaha melakukan Penguatan Penanganan Konflik Sosial. Hal tersebut diwujudkan dengan rencana aksi penyelesaian akar permasalahan berdasarkan pemetaan konflik bersama pemangku kepentingan dengan melibatkan ahli dan masyarakat atau dilakukan secara kolaboratif.

Melalui pemolisian kolaboratif, Polri sebagai alat negara yang bertugas menyelenggarakan Kamdagri, diharapkan senantiasa mencermati dan mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis, serta mampu melakukan pencegahan dan penanganan terhadap konflik SARA di Desa Mareje, Lombok Barat, NTB. Meskipun pada kenyataannya, konflik masih terus terjadi dan mengancam stabilitas keamanan. Penanganan konflik sosial yang dilakukan Polri dilaksanakan dengan berdasarkan pada Perkap No. 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial. Bahwa penanganan

konflik melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik (Rohmah, 2023).

Polisi bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan dimulai oleh Bhabinkamtibmas, Pasukan Sabhara, dan jika berada di daerah rawan (merah), pasukan Huru Hara Brimob (Purwatiningsih & Polri, 2020). Dalam kasus konflik keagamaan, Polri cenderung bekerja sendirian (single fighter), mulai dari menangani TKP hingga tindakan represif serta penyelesaian/resolusi konflik. Selain itu, polisi belum dapat menerapkan pemolisian kolaboratif untuk mengidentifikasi masalah sosial yang menyebabkan konflik sosial.

Penelitian ini berfokus pada permasalahan yang berkaitan dengan pemolisian kolaboratif dalam penanganan konflik sosial, dengan studi kasus konflik Sara di Desa Mareje, Lombok Barat, NTB pada tahun 2021. Permasalahan utama yang diangkat adalah: “Bagaimana pemolisian kolaboratif dalam penanganan konflik sosial?” Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, terdapat beberapa pokok permasalahan yang perlu dirinci. Pertama, analisis mengenai penyebab terjadinya konflik di Mareje, yang dapat melibatkan berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya.

Penelitian ini juga akan mengkaji upaya yang dilakukan oleh Polda NTB dalam menangani konflik tersebut, mencakup langkah-langkah yang diambil untuk meredakan ketegangan dan memfasilitasi dialog antar pihak yang berselisih. Terakhir, strategi pemolisian yang diterapkan dalam menangani konflik Mareje juga akan dianalisis, dengan tujuan untuk mengevaluasi efektivitas pendekatan pemolisian kolaboratif dalam konteks situasi konflik yang kompleks. Berdasarkan pentingnya pemolisian kolaboratif dalam pencegahan konflik SARA di Desa Mareje, Lombok Barat, NTB, agar peneliti dapat menjelaskan secara mendalam mengenai optimalisasi pemolisian dalam pencegahan konflik SARA di Desa Mareje, Lombok Barat, NTB tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mendalami pemolisian kolaboratif dalam penanganan konflik sosial, khususnya terkait isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) di Desa Mareje, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Lokasi penelitian dipilih berdasarkan frekuensi kejadian konflik sosial yang terjadi antara tahun 2014 hingga 2020, serta insiden terbaru pada tahun 2021, sehingga memberikan konteks relevan bagi analisis yang dilakukan. Subjek penelitian melibatkan berbagai pihak, termasuk anggota Polri, terutama Bhabinkamtibmas dan aparat keamanan lainnya, perwakilan masyarakat seperti tokoh masyarakat dan warga yang terpengaruh oleh konflik, serta stakeholder lokal seperti pemuka agama dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berperan dalam proses mediasi.

Data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali pandangan subjek tentang konflik sosial dan efektivitas pemolisian kolaboratif, sementara observasi

partisipatif akan memungkinkan peneliti memahami dinamika interaksi sosial di lapangan. Studi dokumen akan mencakup laporan resmi Polri dan data statistik mengenai konflik sosial di Lombok. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, di mana tema-tema utama yang muncul dari data diidentifikasi dan dihubungkan dengan teori dan konsep yang ada mengenai pemolisian kolaboratif dan konflik sosial.

Peneliti akan melakukan triangulasi data untuk memastikan validitas hasil analisis dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber. Aspek etika penelitian juga diperhatikan, dengan meminta izin dari semua subjek sebelum wawancara dan observasi, serta menjaga kerahasiaan identitas dan informasi pribadi mereka. Penelitian ini direncanakan berlangsung selama enam bulan, dengan tahapan yang mencakup persiapan penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan akhir, serta penyebaran hasil penelitian kepada pemangku kepentingan. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai pemolisian kolaboratif dalam penanganan konflik sosial di Desa Mareje, serta rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas strategi penanganan konflik di masa mendatang.

Hasil dan Pembahasan

Konflik Mareje

Kerusuhan terjadi akibat konflik masyarakat yang terjadi sejak malam takbiran Minggu (1/5/2022) di Desa Mareje, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Di sana, pada hari Selasa, 3 Mei 2022, malam, enam (enam) unit rumah dan tiga (tiga) unit mobil terbakar. Ratusan orang harus mengungsi dari pemukimannya sebagai akibat dari peristiwa tersebut. Konflik terjadi ketika sejumlah orang dari jalur pawai takbiran melempari salah satu rumah warga dengan petasan besar, membuat pemilik rumah pingsan, dan petasan juga dilempar ke kandang ternak milik salah satu warga lainnya, membuat ternak berhamburan. Korban berusaha menegur pelaku. Korban langsung dikeroyok oleh pelaku yang tidak terima. Beberapa orang di barisan pawai takbiran juga melempar batu ke orang-orang yang berkumpul di rumah korban karena mendengar suara ledakan.

Selanjutnya pada hari Senin, 2 Mei 2022, hoaks tersebar di Facebook dan WhatsApp, serta beberapa akun media sosial, menyebarkan informasi yang mendorong perkelahian agama. Keesokan harinya, terjadi pertemuan antara Wakapolres Lombok Barat NTB, perwakilan dari berbagai desa dan dusun di Mareje Lombok Barat, dan pemuka agama lokal. Mereka bertanggung jawab atas insiden tersebut. Selasa malam, sekelompok massa melakukan pembakaran ke 6 unit rumah di desa Mareje. Karena peristiwa itu, puluhan warga melarikan diri ke hutan.

Ratusan orang yang tinggal di desa Mareje dibawa ke gedung Polda NTB dan Polsek Lombok Barat pada hari Rabu (4/5/2022) pagi. Beberapa orang tetap tinggal di hutan. Pada sore harinya, Polda NTB memanggil dua tokoh agama dari desa Mareje Lombok Barat NTB, Idran, S.pd, sebagai perwakilan Muslim, dan Sukman, sebagai

perwakilan Buddha, untuk membuat perjanjian damai. Warga NTB dari berbagai agama berkolaborasi untuk membantu korban pengungsian setelah perdamaian dicapai. Mereka mengumpulkan sumbangan dan menyebarkannya melalui posko Permabudhi. Para pengungsi menerima beras, sayur, dan lauk pauk dari mereka. Selain itu, Muda Mudi Lintas Iman (MULIA) NTB mengumpulkan dana untuk para pengungsi. Selain itu, melalui pesan selular, mereka memberikan dukungan moril kepada pengungsi.

Pada hari Kamis, 5 Mei 2022, Vihara di Lenong, Sekotong Barat, dihancurkan dengan batu oleh sekelompok orang yang tidak diketahui. Setelah disiram dengan pertalite, mereka juga membakar berugak. Namun, orang-orang dari berbagai agama di sana berhasil mencegah tindakan tersebut. Koordinator Divisi Advokasi Solidaritas Korban Tindak Kekerasan Beragama dan Berkepercayaan (Sobat KBB), Usama Ahmad Rizal, menyampaikan rasa berduka atas konflik antar masyarakat yang terjadi di Desa Mareje melalui aksi Muda Mudi Lintas Iman (MULIA) NTB. Vihara di Lenong, Sekotong Barat, dihancurkan dengan batu pada hari Kamis, 5 Mei 2022, oleh sekelompok orang yang tidak diketahui. Mereka juga membakar berugak setelah disiram dengan pertalite. Orang-orang dari berbagai agama berhasil mencegah hal tersebut. Melalui aksi Muda Mudi Lintas Iman (MULIA) NTB, Koordinator Divisi Advokasi Solidaritas Korban Tindak Kekerasan Beragama dan Berkepercayaan (Sobat KBB), Usama Ahmad Rizal menyampaikan rasa berduka atas konflik antar masyarakat yang terjadi di Desa Mareje.

Upaya Polda NTB dalam Menangani Konflik Mareje

Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) mengambil tindakan strategis yang komprehensif dengan memanggil dua tokoh agama dari desa Mareje Lombok Barat (NTB), Idran, S.pd, yang bertindak sebagai perwakilan Muslim, dan Sukman, yang bertindak sebagai perwakilan Buddha, untuk menandatangani perjanjian damai. Setelah perdamaian dicapai, Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) memobilisasi tokoh agama seperti tuan guru dan pendeta untuk melakukan himbauan, tokoh masyarakat, dan kelompok untuk mengurangi konflik mereje. Para warga lintas agama di NTB juga berkolaborasi untuk membantu korban yang di pengungsian. Mereka mengumpulkan sumbangan dan membagikannya melalui posko Permabudhi. Para pengungsi menerima beras, sayur, dan lauk pauk dari mereka. Muda Mudi Lintas Iman (MULIA) NTB juga berpartisipasi dalam penggalangan dana untuk para pengungsi. Selain itu, mereka memberikan dukungan moril kepada para pengungsi melalui SMS.

Selain itu, polisi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengawasi media dengan melakukan counter opini untuk mencegah opini publik tersebar luas. Ini terlihat dari pernyataan Koordinator Divisi Advokasi Solidaritas Korban Tindak Kekerasan Beragama dan Berkepercayaan (Sobat KBB), Usama Ahmad Rizal, yang menyampaikan rasa berduka atas konflik antar masyarakat yang terjadi di Desa Mareje. Dia juga mengapresiasi kelompok lintas agama di NTB yang berjuang bersama dan tidak terprovokasi. agar pengungsi mendapatkan keadilan dan kembali ke kota. Selain itu,

terima kasih kepada komunitas lintas agama Lenong, yang berhasil mencegah pembakaran Vihara.

Dalam Penanganan konflik Mereje Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat ini dapat diatasi dengan cepat dan tepat akan tetapi permasalahan atau konflik ini berawal dari permasalahan sosial biasa yang meluas kepada permasalahan perbedaan ideologi dikarenakan kurang maksimalnya respon dari berbagai semua stakeholder yang ada dalam menanggapi permasalahan pada insiden saat malam pertama tersebut. Awal permasalahan saat itu masih dalam kategori permasalahan gangguan kamtibmas secara umum yang diawali oleh perbuatan berupa pelemparan petasan yang mengganggu ketertiban secara umum dan tindakan kekerasan yang mengakibatkan penganiayaan terhadap korban yang beragama Hindu dan dikarenakan slow respon dalam penanganannya oleh stakeholder pemerintahan yang ada sehingga isu jadi melebar yang mempengaruhi terhadap psikologis massa.

Analisa

Konflik Mareje

Konflik pembakaran rumah warga bergama Hindu di desa Mereje dapat dilihat dari tiga perspektif sosial yang berbeda, yaitu sosial makro, meso, dan mikro.

Sosial Makro

Pada level sosial makro, konflik di desa Mereje ini dapat dipandang sebagai hasil dari perbedaan agama dan budaya yang menjadi masalah struktural di masyarakat. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi konflik ini adalah kurangnya toleransi antaragama, adanya diskriminasi terhadap kelompok minoritas, dan ketidakadilan dalam pembagian sumber daya dan kesempatan.

Sosial Meso

Pada level sosial meso, konflik di desa Mereje ini dapat dipahami sebagai akibat dari persaingan dan ketegangan antara kelompok agama yang berbeda dan lembaga-lembaga sosial di masyarakat. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi konflik ini adalah persaingan atas akses ke sumber daya dan pengaruh politik, ketidakadilan dalam distribusi manfaat pembangunan, serta kurangnya dialog dan kerjasama antara kelompok agama yang berbeda.

Sosial Mikro

Pada level sosial mikro, konflik di desa Mereje ini dapat dipahami sebagai akibat dari interaksi sosial antara individu atau kelompok kecil yang terlibat dalam konflik. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi konflik ini adalah perbedaan kepentingan, nilai, dan norma, serta kurangnya komunikasi dan penyelesaian konflik yang efektif.

Dari ketiga perspektif tersebut, dapat dilihat bahwa konflik pembakaran rumah warga bergama Hindu di desa Mereje memiliki akar masalah yang kompleks dan multidimensional. Oleh karena itu, penyelesaian konflik yang efektif memerlukan pendekatan yang holistik dan menyeluruh, serta melibatkan partisipasi aktif dari seluruh pihak yang terlibat. Perlu ada upaya untuk membangun toleransi antaragama, memperkuat dialog dan kerjasama antara kelompok agama yang berbeda, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang inklusif dan adil.

Perilaku kolektif adalah perilaku dari dua atau lebih individu yang bertindak secara bersama-sama secara kolektif, dan untuk memahami perilaku dengan cara ini harus mengerti dengan semua kehidupan kelompok. Terdapat beberapa penyebab terjadinya perilaku kolektif, dalam meneliti faktor penyebab perilaku kolektif harus menggabungkan beberapa elemen penting dalam perilaku untuk dirangkai menjadi sebuah tahapan yang digunakan sebagai Analisa akhir dalam pola tertentu. Keuntungan dari mempelajari perilaku kolektif adalah dalam kondisi interaksi yang stabil banyak unsur mitos, social, ideologi, potensi kekerasan dan lain baik yang dikendalikan atau yang sudah ditentukan dan karenanya tidak mudah diamati. Smelser memetakan 6 faktor yang menjadi penyebab perilaku kolektif yaitu:

Struktur Sosial

Dalam kesehariannya warga masyarakat Budha hidup secara berkelompok atau mengelompokkan diri dengan indicator dalam penempatan lokasi rumah yang tidak berjauhan dan hal ini terkesan menimbulkan jarak atau ruang pemisah antara warga muslim dengan warga Budha atas dasar ideologi dan struktur sosial yang tidak memadai di daerah tersebut dapat menyebabkan ketidakpuasan dan frustasi di kalangan masyarakat yang kemudian dapat memicu timbulnya konflik.

Instrumen dalam konflik Mereje Kab. Lombok Barat Prov. Nusa Tenggara Barat, adanya pemicu seperti perbedaan agama atau budaya juga dapat memicu timbulnya konflik. Kemudian, individu atau kelompok tertentu dapat memobilisasi masyarakat dan mengarahkan perhatian mereka pada isu-isu tertentu yang dapat memicu konflik lebih lanjut.

Structure Strain

Masyarakat di Mereje merasa terpinggirkan dan tidak diakui oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan. Hal ini dapat memicu rasa tidak puas dan frustrasi di kalangan masyarakat, yang kemudian dapat berkembang menjadi tindakan ekspresi ketidakpuasan, seperti pembakaran rumah.

Generalized Beliefs

Ketika masyarakat merasa frustrasi atau tidak puas dengan kondisi yang ada, hal ini dapat memicu timbulnya konflik. Indikator ini terlihat pada hari Senin (2/5/2022), tersebar hoaks di Facebook dan WhatsApp, serta beberapa akun media sosial (medsos) menyebarkan informasi ada yang mengajak perkelahian antar umat beragama.

Precipating Factor

Terdapat peristiwa atau kejadian yang terjadi secara tiba-tiba dan secara dramatis, seperti kematian atau kekerasan, yang dapat memicu timbulnya konflik. Dalam konflik Mereje Kab. Lombok Barat Prov. Nusa Tenggara Barat, indikator psikologis ini dapat terlihat pada pelaku dan kelompoknya yang tidak menerima ditegur oleh warga pemilik rumah dan pemilik kandang sehingga terjadinya suatu tindak kekerasan pemukulan dan penganiayaan pada insiden malam awal tersebut

Mobilization For Action

Ketika ada individu atau kelompok yang mencoba untuk mengorganisir masyarakat dan mengarahkan perhatian mereka pada isu-isu tertentu, hal ini dapat

memicu timbulnya konflik. Indikator ini dapat terlihat pada hari Selasa malam, sekelompok massa melakukan pembakaran ke 6 (enam) unit rumah dan 3 (tiga) unit sepeda motor di desa Mareje. Karena peristiwa itu, puluhan warga melarikan diri ke hutan.

Failure of Social Control

Pada tahap ini dapat dilihat pada langkah upaya mediasi yang dilakukan oleh Polda NTB memanggil perwakilan dua orang tokoh agama dari desa Mareje Lombok Barat (NTB), yakni Idran, S.pd dari perwakilan Muslim dan Sukman, dari perwakilan Buddhis untuk membuat surat perjanjian damai.

Setelah dilakukannya perdamaian, para warga lintas iman di NTB, turut bahu membahu untuk membantu korban yang di pengungsian. Mereka mengumpulkan donasi dan mendistribusikannya melalui posko Permabudhi. Mereka mengirimkan beras, sayur dan lauk pauk untuk para pengungsi. Muda Muda Lintas Iman (MULIA) NTB juga, ikut melakukan penggalangan dana untuk para pengungsi. Mereka juga memberi dukungan moral kepada pengungsi, melalui pesan selular.

Disamping itu tahapan ini juga terlihat pada adanya penyampaian dari Koordinator Divisi Advokasi Solidaritas Korban Tindak Kekerasan Beragama dan Berkepercayaan (Sobat KBB) Usama Ahmad Rizal yang menyampaikan rasa berduka, atas konflik antar masyarakat yang terjadi di Desa Mareje. Dia juga mengapresiasi kepada kelompok lintas iman di NTB, yang tidak terprovokasi dan berjuang bahu membahu. Agar masyarakat yang mengungsi mendapatkan keadilan dan kembali ke desa dengan keadaan selamat. “Juga apresiasi kepada masyarakat lintas iman di Lenong, yang berhasil menggagalkan aksi pembakaran Vihara,”

Bagi Dahrendorf, masyarakat memiliki dua wajah, yakni konflik dan konsesus yang dikenal dengan teori konflik dialektika. Dengan demikian diusulkan agar teori sosiologi dibagi menjadi dua bagian yakni teori konflik dan teori konsesus. Teori konflik harus menguji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat sedangkan teori konsesus harus menguji nilai integrasi dalam masyarakat. Bagi Ralf, masyarakat tidak akan ada tanpa konsesus dan konflik. Masyarakat disatukan oleh ketidakbebasan yang dipaksakan. Dengan demikian, posisi tertentu di dalam masyarakat mendelegasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain.

Fakta kehidupan sosial ini yang mengarahkan Dahrendorf kepada tesis sentralnya bahwa perbedaan distribusi ‘otoritas’ selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial sistematis. Hubungan Otoritas dan Konflik Sosial Ralf Dahrendorf berpendapat bahwa posisi yang ada dalam masyarakat memiliki otoritas atau kekuasaan dengan intensitas yang berbeda-beda. Otoritas tidak terletak dalam diri individu, tetapi dalam posisi, sehingga tidak bersifat statis.

Seseorang bisa saja berkuasa atau memiliki otoritas dalam lingkungan tertentu dan tidak mempunyai kuasa atau otoritas tertentu pada lingkungan lainnya. Sehingga seseorang yang berada dalam posisi subordinat dalam kelompok tertentu, mungkin saja menempati posisi superordinat pada kelompok yang lain. Mereka yang berada pada

kelompok atas (penguasa) ingin tetap mempertahankan status quo sedangkan mereka berada di bawah (yang dikuasai atau bawahan ingin supaya ada perubahan.

Konflik di desa Mereje ini dapat dipahami sebagai akibat dari persaingan dan ketegangan antara kelompok agama yang berbeda dan lembaga-lembaga sosial di masyarakat. Pembakaran 6 rumah, satu toko kelontong dan sejumlah kendaraan bermotor milik warga beragama Buddha di Dusun Ganjar, Desa Mareje sebagai etnis minoritas merupakan duri dalam toleransi. Peristiwa tersebut menunjukkan perlindungan bagi kalangan minoritas dan upaya merawat kerukunan di negeri ini masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

Upaya Polda NTB dalam menangani konflik Mareje

Steven P. Lab dalam bukunya berjudul *Crime Prevention, Approache, Practices and Evaluations* menjelaskan bahwa pencegahan kejahatan merupakan penyelenggaraan fungsi kepolisian pada tataran pre-emptif dan preventif (yang menonjol dalam kegiatan ini adalah kehadiran Polisi berseragam baik secara perorangan maupun satuan dan wujud peran Polisi selaku pengayom dan memberikan perlindungan dan pelayanan” ik kepada masyarakat. Tindakan pre-emptif dan preventif dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran hukum.

Tindakan ini bertujuan untuk mencegah agar tingkah laku kriminal tidak terjadi, karena apabila tingkah laku kriminal dapat dicegah maka hukum di dalam masyarakat dapat” iditegakkan. “Model perpolisian tradisional memusatkan perhatian pada aspek investigasi dan penindakan dalam kerangka””crime control”, “dengan meletakkan aspek pencegahan kejahatan pada prioritas kedua” (SteveniiP.iiLab, 2006: 32). Upaya Polda NTB dalam menangani konflik Mareje, berbagai bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Fungsi Polda NTB dimaksudkan agar terjalin suatu kemitraan yang positif, sehingga masyarakat pun akan bersama-sama dengan polisi dalam mencegah terjadinya konflik. Kegiatan kemitraan dengan masyarakat, selain bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat, juga dimaksudkan agar masyarakat juga memiliki daya cegah dan daya tangkal terhadap berbagai bentuk konflik.

Strategi Pemolisian Kolaboratif untuk Menangani Konflik Mareje

The Bureau of Justice Assistance (2017) menyampaikan pendekatan Pemolisian Kolaboratif atau Multi-Sektor, merupakan Pemolisian yang mengkolaborasi banyak stakeholders terkait. Dalam teori ini, dinyatakan: *Effective collaboration requires that police and community stakeholders work together by sharing responsibilities, resources, and decision making. Collaboration, then, is more than outreach, or information-sharing alone; it requires joint actions with shared responsibilities and shared decision making.* Terjemahan bebas: efektifnya kolaborasi memerlukan kerja bersama antara Polisi dan stakeholders lainnya dengan berbagi tanggung jawab, sumber daya maupun sinergisitas pengambilan keputusan. Model pemolisian ini memerlukan aksi gabungan (joint actions) dengan berbagi kewenangan/tanggung jawab serta area pengambilan keputusan sesuai ranah masing masing.

Pada kolaborasi multi-sektor ini, terdapat langkah mulai *community outreach* hingga Kolaborasi. Sinergisitas Polri dengan stakeholders dalam bentuk kolaborasi multisektor atau multi-sector collaboration (BJA, 2017) dalam rangka pemolisian kolaboratif, untuk mengantisipasi konflik Mareje diharapkan dapat diterapkan secara optimal. Penerapan pemolisian kolaboratif yang optimal serta kolaborasi dengan stakeholders, diharapkan dapat mewujudkan Koordinasi lintas sektoral dalam upaya mengantisipasi potensi kerawanan yang berimplikasi gangguan kamtibmas. Dengan demikian, penanganan awal terhadap permasalahan sosial yang berimplikasi gangguan kamtibmas dapat berjalan secara sinkron, memiliki kesamaan visi ataupun arah serta kesatuan Komando atau sinergitas dalam menyikapi suatu permasalahan konflik Mareje ataupun konflik lain berlatarbelakang SARA. Kolaborasi multi-sektor merupakan hal yang mutlak harus diwujudkan dalam penanganan isu-isu sensitif yang berpotensi memicu konflik berlatarbelakang SARA.

Pemolisian berbasiskan kolaborasi multi-sektor, *problem solving*, dan peran aktif masyarakat dan penguatan peran Binmas serta Intelkam dalam mengelola potensi kekuatan masyarakat (Rozikin et al., 2020). Pemolisian kolaboratif menuntut pelibatan peran aktif banyak sektor terkait, untuk selanjutnya kesemuanya berpartisipasi dalam tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) (Risa, 2022). Kolaborasi Polri dengan berbagai ekosistem Pemerintah maupun non Pemerintah, merupakan kunci sukses implementasi model Pemolisian Prediktif yang efektif (Parlina, 2022). Untuk itu, Polri secara aktif dan progresif perlu membangun aliansi strategis dan menguatkan sinergisitas Polisional dengan elemen-elemen terkait, melalui kolaborasi multi-sektor dalam format kolaborasi Pentahelix.

Kolaborasi Pentahelix ini merupakan kembangan/inovasi ekologi sosial, mulai dari Triplehelix, Quadruplehelix hingga Quintuple/Pentahelix (Pugra et al., 2021). Dalam format Pentahelix ini, terdapat 5 elemen/sistem yang menjadi modal sosial, yaitu unsur sistem Pemerintah/Negara, unsursistem Akademisi, unsur sistem dunia usaha, unsur media, dan elemen/komponen masyarakat secara luas.

Kesimpulan

Konflik di Desa Mareje terjadi pada Selasa malam (3/5/2022), menyebabkan pembakaran enam rumah dan tiga sepeda motor, serta ratusan warga mengungsi. Insiden bermula saat beberapa orang dalam pawai takbiran melempar petasan besar ke rumah dan kandang ternak warga, yang memicu keributan. Ketegangan meningkat ketika korban yang mencoba menegur pelaku justru dikeroyok, dan warga yang berkumpul juga menjadi sasaran pelemparan batu.

Polda NTB mengambil langkah untuk menangani konflik melalui kemitraan masyarakat, bertujuan meningkatkan kesadaran hukum dan kemampuan mencegah konflik. Pendekatan awal terhadap konflik SARA menekankan pentingnya sinergitas multi-sektor dan kesatuan komando. Untuk mengatasi konflik berlatar belakang SARA seperti di Mareje, Polri disarankan membentuk "Satgas Penanganan Isu SARA" yang

terdiri dari berbagai instansi pemerintah, untuk memastikan koordinasi efektif dan penanganan menyeluruh.

BIBLIOGRAFI

- Fuadi, S. H. (2020). *Resolusi Konflik Sosial Perspektif Hukum Islam*. 2(1), 86–110.
- Hardiawan, I., & Agus, M. N. (2021). *PERAN DIREKTORAT INTELIJEN KEAMANAN POLDA BALI DALAM MENGANTISIPASI KONFLIK SOSIAL DI PROVINSI BALI*. Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Jati, W. R. (2014). Toleransi Beragama Dalam Pendidikan Multikulturalismesiswa Sma Katolik Sang Timur Yogyakarta. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 33(1).
- Mustaqim, M., & Mustaghfiroh, H. (2015). Pendidikan Islam Berbasis Multikulturalisme. *Addin*, 7(1).
- NG, I. N., Yusuf, Y., & Tantoro, S. (2023). Resolusi Konflik Sosial oleh Forum Komunikasi Pemolisian Masyarakat di Kepolisian Sektor Bukit Raya. *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial Dan Budaya*, 12(3), 411–424.
- Parlina, R. (2022). Tata Pemerintahan Yang Baik Dan Kolaborasi Penyelenggaraan Pemerintahan (Sistematik Literatur Review). *Jurnal Arajang*, 5(1), 58–68.
- Pugra, I. W., Oka, I. M. D., & Suparta, I. K. (2021). Kolaborasi Pentahelix Untuk Pengembangan Desa Timpag Menuju Desa Wisata Berbasis Green tourism. *Bhakti Persada Jurnal Aplikasi IPTEKS*, 7(2), 111–120.
- Purwatiningsih, B., & Polri, W. I. S. S. L. (2020). OPTIMALISASI PENANGGULANGAN KONFLIK SOSIAL GUNA Mendukung Pemilu Damai 2024 Dalam Rangka Memelihara KAMTIBMAS. *SANYATA*, 63.
- Risa, F. (2022). Pemolisian Kolaboratif pada Penanganan Kasus Bunuh Diri di Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(10), 1032–1043.
- Rohmah, E. I. (2023). Dinamika Kekuasaan Dalam Penyelesaian Konflik Antar Agama. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 22(2).
- Rozikin, M., Hesty, W., & Sulikah, S. (2020). Kolaborasi dan E-Literacy: Kunci Keberhasilan Inovasi E-Government Pemerintah Daerah. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(1), 61–80.
- Sahputra, R. (2021). *Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menangani konflik rumah ibadat Tahun 2015 di Kabupaten Aceh Singkil*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah.
- Susi, S., Nurachmana, A., Purwaka, A., Cuesdeyeni, P., & Asi, Y. E. (2021). Konflik Sosial Dalam Novel Nyala Semesta Karya Farah Qoonita. *ENGGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya*, 2(1), 32–43.
- Tambunan, D. A., & Hamid, S. (2024). SUBKULTUR KOMUNITAS VESPA GEMBEL: STRATEGI PEMOLISIAN DALAM MENGATASI STIGMA DAN MARGINALISASI SOSIAL. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(4), 282–296.
- Ummah, A. H. (2023). Religion, Tradition and Communication: A Reflection of Muslim and Buddhism Relations in Mareje Timur Lombok Barat. *Proceeding of Dakwah Saizu International Conference*, 1(1), 239–252.
- Yana, E. (2019). Potensi Ekonomi dan Aksesibilitas: Analisis Sektor yang Potensial dan Mempunyai Keunggulan Kompetitif Menuju Cirebon Kota Metropolitan Baru.

- Edunomic: Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 7(1), 1–15.
- Fuadi, S. H. (2020). *Resolusi Konflik Sosial Perspektif Hukum Islam*. 2(1), 86–110.
- Hardiawan, I., & Agus, M. N. (2021). *PERAN DIREKTORAT INTELIJEN KEAMANAN POLDA BALI DALAM MENGANTISIPASI KONFLIK SOSIAL DI PROVINSI BALI*. Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Jati, W. R. (2014). Toleransi Beragama Dalam Pendidikan Multikulturalismesiswa Sma Katolik Sang Timur Yogyakarta. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 33(1).
- Mustaqim, M., & Mustaghfiroh, H. (2015). Pendidikan Islam Berbasis Multikulturalisme. *Addin*, 7(1).
- NG, I. N., Yusuf, Y., & Tantoro, S. (2023). Resolusi Konflik Sosial oleh Forum Komunikasi Pemolisian Masyarakat di Kepolisian Sektor Bukit Raya. *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial Dan Budaya*, 12(3), 411–424.
- Parlina, R. (2022). Tata Pemerintahan Yang Baik Dan Kolaborasi Penyelenggaraan Pemerintahan (Sistematik Literatur Review). *Jurnal Arajang*, 5(1), 58–68.
- Pugra, I. W., Oka, I. M. D., & Suparta, I. K. (2021). Kolaborasi Pentahelix Untuk Pengembangan Desa Timpag Menuju Desa Wisata Berbasis Green tourism. *Bhakti Persada Jurnal Aplikasi IPTEKS*, 7(2), 111–120.
- Purwatiningsih, B., & Polri, W. I. S. S. L. (2020). OPTIMALISASI PENANGGULANGAN KONFLIK SOSIAL GUNA MENDUKUNG PEMILU DAMAI 2024 DALAM RANGKA MEMELIHARA KAMTIBMAS. *SANYATA*, 63.
- Risa, F. (2022). Pemolisian Kolaboratif pada Penanganan Kasus Bunuh Diri di Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(10), 1032–1043.
- Rohmah, E. I. (2023). Dinamika Kekuasaan Dalam Penyelesaian Konflik Antar Agama. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 22(2).
- Rozikin, M., Hesty, W., & Sulikah, S. (2020). Kolaborasi dan E-Literacy: Kunci Keberhasilan Inovasi E-Government Pemerintah Daerah. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(1), 61–80.
- Sahputra, R. (2021). *Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menangani konflik rumah ibadat Tahun 2015 di Kabupaten Aceh Singkil*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah.
- Susi, S., Nurachmana, A., Purwaka, A., Cuesdeyeni, P., & Asi, Y. E. (2021). Konflik Sosial Dalam Novel Nyala Semesta Karya Farah Qoonita. *ENGGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya*, 2(1), 32–43.
- Tambunan, D. A., & Hamid, S. (2024). SUBKULTUR KOMUNITAS VESPA GEMBEL: STRATEGI PEMOLISIAN DALAM MENGATASI STIGMA DAN MARGINALISASI SOSIAL. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(4), 282–296.
- Ummah, A. H. (2023). Religion, Tradition and Communication: A Reflection of Muslim and Buddhism Relations in Mareje Timur Lombok Barat. *Proceeding of Dakwah Saizu International Conference*, 1(1), 239–252.
- Yana, E. (2019). Potensi Ekonomi dan Aksesibilitas: Analisis Sektor yang Potensial dan Mempunyai Keunggulan Kompetitif Menuju Cirebon Kota Metropolitan Baru. *Edunomic: Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 7(1), 1–15.

Copyright holder:

Donny Bayuanggoro (2024)

First publication right:

Syntax Admiration

This article is licensed under:

